

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah:

Pembekuan keanggotaan Fiji pada tahun 2009 dalam Pacific Island Forum (PIF) seolah menjadi titik balik meningkatnya peran dan kekuatan Fiji di kawasan Pasifik Selatan. Pada dasarnya pembekuan tersebut terjadi karena adanya instabilitas politik di ranah domestik Fiji yang ditandai dengan terjadinya beberapa kudeta. Sejak kemerdekaannya pada tahun 1970, Fiji setidaknya telah mengalami empat kali kudeta terhadap pemerintahan yang sah. Kudeta pertama dan kedua terjadi pada tahun 1987. Kudeta tersebut dipicu oleh kesulitan dalam mengelola pluralitas etnis dalam pemerintahan Fiji (Brown, 1989). Tidak berhenti di situ saja, kudeta kembali terjadi pada tahun 2000 yang disebabkan oleh isu serupa, yakni gesekan antara etnis keturunan India dengan penduduk asli Fiji yang termanifestasi dalam ketidakseimbangan komposisi etnis dalam parlemen Fiji. Berkaca dari dua alasan kudeta tersebut, dapat dilihat bahwa kudeta telah menjadi ‘budaya’ di Fiji. Hal tersebut disepakati oleh Fraenkel dan Firth (2009) yang melihat bahwa terjadinya kudeta di Fiji merupakan suatu sindrom. Hal ini dikarenakan alasan terjadinya kudeta bukanlah permasalahan ekonomi maupun kemiskinan, tetapi permasalahan etnis. Berlanjut pada kudeta di tahun 2006 yang terjadi karena isu yang berbeda dari kudeta-kudeta yang sebelumnya. Kudeta yang dianggap sebagai kudeta yang mengakhiri segala rangkaian kudeta yang terjadi di Fiji ini terjadi dengan dipimpin oleh Frank Bainimarama karena protes terhadap krisis yang terjadi di Fiji sejak berlangsungnya kudeta tahun 2000 (Fraenkel & Firth, 2009). Dalam kudeta ini Frank Bainimarama memprotes keras kepemimpinan Laisenia Qarase. Setelah berhasil mengambil alih kepemimpinan, Bainimarama menjadi Perdana Menteri Fiji dengan rezim militernya. Sementara Australia, negara-negara Pasifik Selatan lainnya, dan juga negara-negara *patron* seperti Inggris menghendaki Fiji untuk tetap menjalankan pemerintahan yang demokratis. Akan tetapi Fiji menolaknya, termasuk menolak untuk melakukan

pemilihan umum. Situasi tersebut dikhawatirkan dapat memicu instabilitas di kawasan, terutama bila negara-negara lainnya tergerak untuk mengikuti Fiji dalam melakukan kudeta terhadap pemerintahan. Karenanya, Australia sebagai negara yang mendominasi PIF, dan memiliki kendali atas bantuan ekonomi terhadap Fiji, memilih untuk membekukan keanggotaan Fiji di PIF.

Pembekuan keanggotaan Pacific Island Forum (PIF) tersebut lantas membuat Fiji seolah diisolasi di kawasan. Hubungan Fiji dengan negara-negara tetangga termasuk Australia dan Selandia Baru menjadi renggang. Pembekuan tersebut menutup akses kerjasama Fiji baik di bidang ekonomi, diplomatik, pariwisata, hingga olahraga. Hill (2010) menjelaskan bahwa Australia dan Selandia Baru memberikan sanksi diplomatik, baik secara bilateral, regional, maupun global terhadap Fiji. Sanksi tersebut diwujudkan dalam pembatasan visa, yang menunjukkan adanya penarikan pengakuan terhadap suatu rezim sekaligus untuk melemahkan persepsi domestik dan internasional terhadap rezim tersebut (Hill, 2010). Hal ini membuat pekerja Fiji tidak dapat memperoleh visa kerja ke kedua negara tersebut. Tidak hanya itu, bentuk sanksi lain yang diberikan pada Fiji adalah penghentian bantuan luar negeri, sementara sebelumnya kedua negara tersebut memiliki peran sebagai pendonor bantuan terbesar kepada Fiji. Lebih lanjut, keanggotaan Fiji dalam Commonwealth Minister of Action Group (CMAG) juga dibekukan. Dalam aspek militer, Australia dan Selandia Baru banyak membatalkan latihan bersama dengan tentara Fiji (Lal, 2009). Situasi tersebut tentu kemudian menempatkan Fiji pada posisi yang sulit.

Lebih lanjut, karena situasi sulit akibat sanksi isolasi tersebut, Fiji lantas mencari jalan keluar melalui dukungan dari negara-negara lain. Karenanya, pada tahun 2010 dalam agenda kegiatan Melanesia Spearhead Group (MSG) yang dibatalkan, Fiji mulai menggalang diadakannya pertemuan dengan para kepala negara di kawasan Pasifik Selatan yang dikenal dengan *Engaging with the Pacific* (EWTP) (Tarte, 2015). Berlanjut pada tahun 2012, diadakan kembali pertemuan yang menggalang pembentukan Pacific Island Development Forum (PIDF). Hingga akhirnya tahun 2013 Fiji berhasil menggandeng negara-negara di kawasan untuk

bergabung dengan PIDF (Tarte, 2015). Akan tetapi, di luar dugaan, PIDF yang didirikan oleh Fiji, yang memiliki kapasitas yang lebih kecil bila dibandingkan dengan Australia dan Selandia baru, mampu membentuk organisasi regional baru yang mampu menandingi PIF. Hingga saat ini PIDF memiliki 14 anggota yang mayoritas juga merupakan anggota dari PIF. Tidak hanya itu, PIDF juga mampu membentuk kerjasama dengan organisasi regional lain seperti Melanesia Spearhead Group (MSG), serta membangun kerjasama lainnya dengan PNG Development Forum, Solomon Islands PM Roundtable, Micronesia Chief Executive Summit, Tonga/Ha’apai Roundtable, Vanuatu Green Growth Dialogue, Fiji Development Forum, dan Pacific Green Growth Coalition. Tidak dapat dipungkiri bahwa PIDF telah berhasil menjadi organisasi regional baru yang setara dengan PIF. Sehubungan dengan keberhasilan Fiji dalam membentuk Pacific Island Development Forum tersebut, maka dapat dikatakan bahwa Fiji telah mampu memainkan perannya sebagai “pemimpin” di Pasifik Selatan. Hal tersebut mencerminkan predikat Fiji sebagai *secondary regional power* di Pasifik Selatan.

1.2 Rumusan Masalah

Sebagaimana yang diketahui, keanggotaan Fiji dalam Pacific Island Forum telah dibekukan oleh Australia, sehingga menutup berbagai akses bantuan dan kerjasama Fiji dalam kawasan. Karena itu Fiji memiliki keterbatasan kekuatan. Sebagai *small state* di Pasifik, bagaimanakah upaya Fiji untuk memperkuat suaranya dalam mewujudkan perannya sebagai *regional power*?

1.3 Kerangka Berpikir

Guna menganalisis signifikansi peran Fiji sebagai *regional power* di kawasan, penulis menggunakan dua kerangka berpikir. Kerangka pertama berbicara mengenai upaya yang dilakukan oleh Fiji untuk memperkuat suaranya dalam cakupan regional dan internasional dengan posisinya sebagai negara mikro. Sementara kerangka kedua membahas mengenai dampak dari upaya pertama yang memicu munculnya *secondary regional power*. Kedua kerangka tersebut

mengarah pada analisis mengenai upaya Fiji sebagai *small states* untuk memperkuat suaranya dan menjadikannya sebagai *regional power*.

Pada dasarnya, setiap negara di dunia tentu berupaya untuk mempertahankan dan mewujudkan kepentingan nasionalnya dalam tatanan internasional bagaimanapun situasinya. Termasuk ketika suatu negara memperoleh tekanan dari negara lain serta dikeluarkan dari organisasi yang mulanya memiliki andil besar dalam pemenuhan kepentingan nasionalnya. Oleh sebab itu, dalam upaya pemenuhan kepentingan tersebut, negara memerlukan kerja sama baik dengan negara lain maupun dengan organisasi lain. Hal ini selaras dengan asumsi pandangan liberalisme yang menekankan pada arti penting kebebasan dan pandangan positif terhadap manusia dan negara (Jackson & Sorensen, 1999). Liberalisme meyakini bahwa setiap individu dan negara memiliki kecenderungan untuk bersaing dalam mewujudkan kepentingannya. Akan tetapi liberalisme juga meyakini bahwa individu dan negara yang memiliki banyak kepentingan dapat terlibat dalam hubungan yang bersifat kolaboratif dan kooperatif, baik dalam skala domestik maupun skala internasional, sehingga interaksi internasional dapat bersifat kooperatif daripada konfliktual (Jackson & Sorensen, 1999).

Karenanya, dalam kondisi yang tidak menguntungkan suatu negara dan adanya tuntutan untuk dapat terus bertahan, suatu negara umumnya mencoba menggandeng kekuatan lain melalui kerja sama dan diplomasi. Kerja sama dan diplomasi sendiri dapat dilakukan oleh suatu negara dalam bentuk bilateral dan multilateral. Kerja sama dan diplomasi multilateral ini kemudian dapat dilakukan negara dengan memanfaatkan *platform* organisasi regional dan organisasi internasional. Dewasa ini organisasi internasional telah mampu menjadi aktor dominan dalam mengatasi berbagai krisis dalam politik internasional (Abbott & Snidall, 1998). Tidak dapat dipungkiri bahwa pada akhirnya negara menggunakan organisasi internasional sebagai kendaraan untuk melakukan kerja sama antar negara dan mencapai kepentingan mereka. Organisasi internasional mampu memberi keuntungan lebih besar ketika negara memanfaatkan organisasi internasional. Abbot dan Snidall (1998) juga menekankan fungsi utama organisasi

internasional bagi negara yakni memfasilitasi negosiasi dan implementasi perjanjian, menyelesaikan sengketa, mengelola konflik dan permasalahan, memberikan bantuan, dan membentuk wacana internasional. Penempatan organisasi internasional sebagai instrumen untuk mencapai kepentingan dilakukan tidak hanya oleh negara besar, tetapi juga oleh negara kecil bahkan *micro states*. Lebih lanjut, perlu diingat kembali bahwa tidak mudah bagi *small states* dan *micro states* untuk mencapai kepentingannya karena keterbatasan kapasitas yang dimiliki. Tidak jarang keberadaan *small states* dalam tatanan internasional juga kurang diperhatikan, oleh sebab itu, diperlukan upaya untuk *amplifying their voices*. Upaya tersebut dapat dimanifestasikan dalam berbagai bentuk, diantaranya diplomasi, kerja sama multilateral, pembentukan aliansi, maupun organisasi internasional. Guna menjalankan upaya tersebut, Fiji sebagai *small states* memanfaatkan gagasan dan idenya yang cocok dengan kepentingan kawasan sebagai modalitas utama dalam melakukan diplomasi. Hal-hal tersebut dapat digunakan oleh negara-negara kecil untuk mengatasi keterbatasan kapasitas mereka (Mushelenga & Van Wyk, 2017). Hal ini kemudian dapat dipahami secara sederhana dalam konsep *small states diplomacy*.

Sehubungan dengan hal tersebut, dewasa ini dunia internasional tidak lagi dihadapkan pada tatanan yang bersifat unipolar. Oleh sebab itu, terdapat kekuatan lain di luar *great power* yang signifikan dalam mempengaruhi dinamika regional maupun internasional. Kondisi ini mengarah pada kemunculan *middle power*, *regional power*, dan *middle power in the region* atau *secondary regional power*. Pada dasarnya konsep *secondary regional power* merupakan elaborasi dua konsep yakni *middle power* dan *regional power*. *Middle power* merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan negara-negara yang bukan *superpowers* maupun *great powers* namun tetap memiliki pengaruh signifikan terhadap dinamika internasional (Flemes, 2007). Keohane (1969, dalam Flandes 2007) mendefinisikan *middle power* sebagai negara yang pemimpinnya menganggap bahwa mereka tidak dapat bertindak sendiri secara efektif, namun mungkin dapat memiliki dampak sistemik dalam kelompok kecil atau melalui lembaga internasional. Sementara Wright (1978, dalam Flandes 2007) mencirikan *middle*

power sebagai negara dengan kekuatan militer, memiliki sumber daya dan posisi strategis, namun tidak memiliki intensi untuk secara penuh menjadi hegemoni.

Sementara *regional power* didefinisikan sebagai negara yang memiliki peran dalam pembentukan perdamaian dan kebijakan di kawasan (Flemes, 2007). Østerud (1992) kemudian mendefinisikan *regional power* dengan karakteristik antara lain: (1) negara yang secara geografis merupakan bagian dari kawasan yang digambarkan; (2) yang mampu melawan koalisi negara-negara lain di wilayah tersebut; (3) memiliki pengaruh dalam urusan regional. Sementara, Schoeman (2003) mengusulkan beberapa prasyarat *regional power* seperti dinamika internal politik dan ekonomi yang memungkinkan untuk memainkan peran dalam menstabilkan dan memimpin di wilayahnya. Selain itu *regional power* juga harus mampu untuk memikul peran sebagai pemimpin regional, stabilisator, penjaga perdamaian, atau setidaknya sebagai pendamai. Lebih lanjut, suatu *regional power* juga diharapkan memiliki kapasitas untuk mengasumsikan kepemimpinan di kawasan, serta memperoleh penerimaan dari negara-negara tetangganya sebagai pemimpin yang bertanggung jawab atas keamanan regional (Schoeman, 2003). Serupa dengan pandangan Schoeman, Baldwin (2002) juga mengklasifikasikan *regional power* dengan kriteria: (1) mampu merumuskan klaim kepemimpinan; (2) memiliki sumber daya yang memadai; (3) penggunaan instrumen kebijakan luar negeri secara efektif; dan (4) peran kepemimpinannya diterima oleh negara lain.

Tabel 1.1 Indikator *Middle Power* dan *Regional Power*

No.	Indikator <i>Middle Power</i>	Indikator <i>Regional Power</i>
1.	Kapasitas sumber daya yang dimiliki di bawah <i>great power</i>	Memiliki klaim kepemimpinan
2.	Memiliki pengaruh signifikan	Memiliki sumber daya yang memadai
3.	Tidak dapat bertindak sendiri	Menggunakan instrumen kebijakan luar negeri secara efektif

4.	Memerlukan aliansi dengan lembaga internasional untuk mempertegas perannya	Peran kepemimpinannya diterima oleh negara lain
----	--	---

Sumber: Keohane (1969, dalam Flesmes 2007); Baldwin (2002)

Oleh karena itu, Huntington (1999) kemudian mengemukakan konsep *rising regional power* yang akhirnya berkembang dan berkaitan dengan konsep *middle power in the region* atau lebih dikenal dengan *secondary regional powers*. Secara sederhana, *secondary regional power* merupakan kekuatan kedua atau kekuatan tengah yang ada pada suatu kawasan, yang keberadaannya untuk mengimbangi kekuatan regional maupun menekan kekuatan regional. Huntington kemudian juga mengklasifikasikan negara dalam tiga tingkatan, yaitu: (1) *the lonely superpower*; (2) *major regional power* sebagai kekuatan terbesar dalam suatu kawasan; dan (3) *secondary regional power* yang memiliki peran signifikan dalam kawasan namun tidak sekuat *major regional*. Lebih lanjut, Huntington melihat adanya karakteristik yang tidak jauh berbeda antara *secondary regional power* dengan *middle power*, yakni penekanan pada pendekatan multilateral dan pendekatan kooperatif. Terlepas dari itu, *soft power* dapat dijadikan sebagai salah satu aspek yang dapat digunakan selain adanya kedua pendekatan yang telah disebutkan. Menyepakati argumen Huntington, Wehner (2014) kemudian juga mengemukakan hierarki kekuatan regional dalam tiga kelompok yakni *regional power*, *secondary power*, dan *small power*.

1.4 Hipotesis

Berdasarkan pembahasan tersebut penulis memperoleh beberapa jawaban sementara. Fiji merupakan *small states* di kawasan Pasifik yang memiliki misi menjadi *regional power*. Guna mewujudkan misi tersebut Fiji mengimplementasikan *small states diplomacy* dalam *new Pacific diplomacy* yang diwujudkan dalam diplomasi bilateral dan multilateral. Dengan diplomasi bilateral tersebut Fiji berhasil menjalin kerja sama dengan berbagai negara seperti Tiongkok, Rusia, dan Indonesia. Sementara dengan diplomasi multilateral, Fiji memanfaatkan *platform* organisasi internasional dan organisasi regional untuk

mewujudkan kepentingannya. Lebih jauh lagi, Fiji juga berhasil membentuk organisasi regional baru di kawasan yakni Pacific Island Development Forum (PIDF), pasca dikeluarkan dari Pacific Island Forum (PIF) oleh Australia.

1.5 Metodologi dan Metode Penelitian

1.5.1 Definisi Konseptual dan Operasionalisasi Konsep

1.5.1.1 *Secondary Regional Power*

Scholvin (2017) dalam tulisannya mengungkapkan bahwa *secondary power* merupakan negara-negara terkuat kedua dalam hierarki regional. Selain dari peringkat GDP di kawasan, posisi *secondary power* tersebut juga didukung oleh faktor lain seperti militer dan peran kepemimpinan di kawasan. Lebih lanjut, *secondary power* cenderung memiliki tendensi untuk berkontestasi dengan *regional powernya*. Di kawasan Pasifik Selatan, Fiji dapat dikatakan sebagai *secondary regional power* yang diukur dari beberapa faktor seperti tingkat GDP per kapita, kapasitas militer, peran kepemimpinan di kawasan, serta pengakuan dari negara lain. Dari segi ekonomi, meski sempat mengalami penurunan di tahun 2015, namun GDP per kapita Fiji dari tahun 2013 hingga 2019 cenderung mengalami peningkatan (Trading Economics, 2020). Selain itu, Fiji juga menempati peringkat keempat GDP per kapita tertinggi Pasifik di tahun 2018. Sementara dalam aspek militer, Fiji merupakan salah satu negara di Pasifik yang memiliki militer. Dalam perkembangannya Fiji melakukan kerja sama militer dengan berbagai negara, termasuk Rusia. Sedangkan kapasitas kepemimpinannya ditunjukkan dari kontribusi Fiji sebagai *chair* dalam sejumlah forum regional, juga peran Fiji sebagai perwakilan Pasifik dalam berbagai forum internasional.

1.5.1.2 *Small States Diplomacy*

Small states diplomacy adalah bentuk diplomasi yang secara khusus dilakukan oleh negara kecil. Negara kecil yang dimaksudkan dalam konteks ini adalah negara dengan ukuran wilayah teritorial yang kecil, populasi penduduk yang kecil, kapasitas ekonomi yang terbatas, serta keterlibatan di level global yang cenderung rendah (Mushelenga & Van Wyk, 2017). Di Pasifik Selatan, konsep

small states diplomacy ini kemudian mengarahkan pada kemunculan *new Pacific Diplomacy*. *New Pacific diplomacy* sendiri dikemukakan oleh Fiji di bawah pemerintahan Bainimarama. Pada dasarnya diplomasi ini memiliki beberapa prinsip kebijakan, antara lain: (1) mengumpulkan dan mewakili suara Pasifik agar dapat didengar oleh forum global; (2) terlibat dalam kerja sama selatan-selatan di Pasifik dan dunia; (3) pengontrolan diplomasi dan institusi regional oleh negara-negara Pasifik Selatan sendiri tanpa adanya kekuatan metropolitan utamanya Australia; (4) organisasi regional di Pasifik Selatan perlu untuk lebih terorganisir untuk dapat bergabung dalam forum global; dan (5) menekankan bahwa pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta merupakan mitra sejajar dalam jaringan diplomasi (Fry & Tarte, 2015)

1.5.1.3 Regionalisme dan organisasi internasional

Regionalisme merupakan pembentukan organisasi oleh negara-negara dengan kepentingan yang sama, yang kini tidak lagi hanya terbatas pada wilayah tertentu. Hal ini dikarenakan integrasi yang terjadi di kawasan tersebut tidak terlepas dari dorongan faktor identitas, kepentingan ekonomi, serta pertahanan dan keamanan yang sama (Gavin, et.al, 2005; Acharya & Johnston, 2007; Slocum & Van Langenhove, 2005). Sementara organisasi internasional merupakan *platform* bagi negara-negara untuk melakukan kerja sama guna mencapai kepentingan nasionalnya (Abbott & Snidall, 1998). Fiji sendiri merupakan salah satu negara yang memanfaatkan keberadaan organisasi regional dan internasional untuk memperkuat suaranya. Hal tersebut termanifestasikan melalui pembentukan Pacific Island Development Forum yang dibentuk oleh Fiji pada tahun 2013 (Tarte, 2015).

1.5.2 Tipe Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan tipe deskriptif dengan pertanyaan bagaimana upaya Fiji yang merupakan *small states* di kawasan dapat menjadi *secondary regional power* di Pasifik Selatan, sekaligus memainkan peran yang

signifikan di kawasan. Hal ini dilakukan karena penulis ingin mengetahui apa saja yang dilakukan Fiji hingga mampu berada di posisi tersebut.

1.5.3 Ruang Lingkup dan Jangkauan Penelitian

Pada penelitian ini, penulis menggunakan rentang waktu mulai tahun 2009. Tahun 2009 merupakan penanda pembekuan keanggotaan Fiji dalam PIF yang sekaligus menjadi titik balik kekuatan Fiji di kawasan. Kemudian dilanjutkan dengan pembentukan PIDF oleh Fiji pada tahun 2013 hingga tahun 2020 ketika data terakhir dari penelitian ini diambil.

1.5.4 Teknik Pengumpulan Data

Guna memperoleh data yang menunjang penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data yakni studi literatur. Penulis menggunakan data primer yang diperoleh dari laporan resmi tahunan dan data sekunder yang diperoleh melalui buku, artikel dalam buku, jurnal dan artikel daring, hingga berita yang terkait dengan Fiji, pendirian PIDF, perannya dalam kawasan, hingga relasinya dengan negara besar seperti Tiongkok.

1.5.5 Teknik Analisis Data

Untuk dapat menjawab rumusan masalah serta membuktikan hipotesis, data-data yang didapat oleh penulis kemudian dianalisis dengan teknik analisis kualitatif. Teknik ini berarti bahwa penulis menganalisis data-data yang bersifat sekunder, seperti laporan maupun berita.

1.5.6 Sistematika Penulisan

Secara umum, penelitian ini dibagi dalam lima bab utama. Bab I berupa pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tinjauan pustaka, kerangka berpikir, hipotesis, serta metodologi dan metode penelitian. Pada Bab II penulis menjelaskan temuan mengenai *secondary regional power* dan analisis yang membuktikan bahwa Fiji merupakan *secondary regional power* di kawasan Pasifik Selatan. Sementara pada Bab III, penulis membahas mengenai upaya Fiji sebagai *secondary regional power* untuk meningkatkan perannya di

kawasan yakni melalui *new Pacific diplomacy* yang diwujudkan dalam perluasan kerja sama multilateral dengan beberapa negara seperti halnya Tiongkok. Selanjutnya, pada Bab IV, penulis menganalisis mengenai peran Fiji dalam berbagai organisasi kawasan yang ada di Pasifik Selatan serta keberhasilan Fiji dalam menciptakan regionalisme tandingan di Oseania, yakni Pacific Island Development Forum (PIDF). Kemudian skripsi ini akan ditutup dengan kesimpulan pada Bab V.